



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

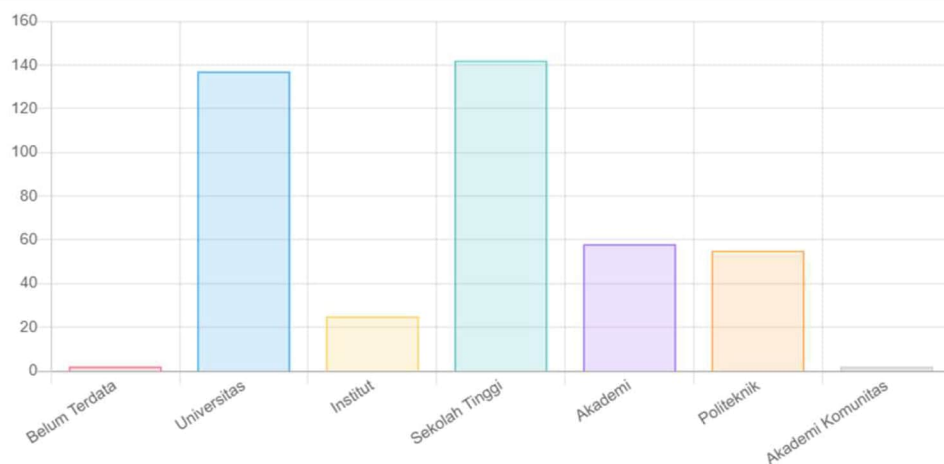
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI YANG BAIK, PILAR UTAMA AKUNTABILITAS PUBLIK

**LINDUNG S M SIRAIT, S.E.,Ak.,M.Si.
INSPEKTUR 1
ITJEN KEMDIKTISAINTEK
Bandung, 21 Oktober 2025**

Kondisi Perguruan Tinggi di Bawah LLDIKTI IV: 421 PT, 345 di Jawa Barat, 76 di Banten



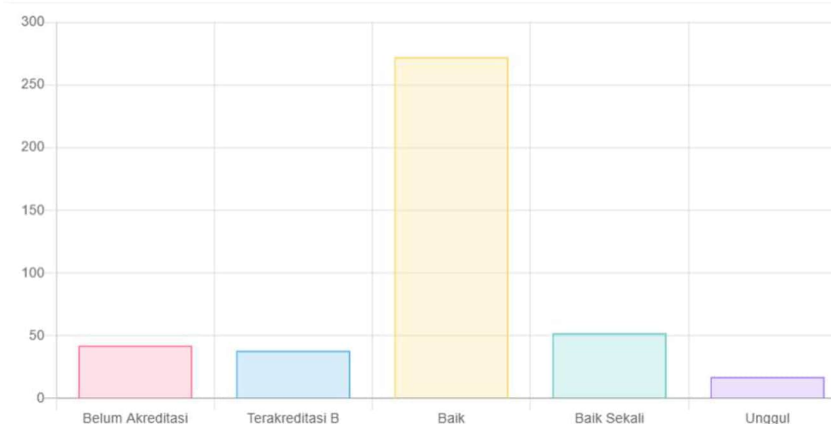
Jumlah PT Berdasarkan Bentuk



Rekap Perguruan Tinggi

No	Bentuk	Jumlah
1	Belum Terdata	2
2	Universitas	137
3	Institut	25
4	Sekolah Tinggi	142
5	Akademi	58
6	Politeknik	55
7	Akademi Komunitas	2
Total		421

Akreditasi PT : Jumlah PT Aktif 421 PT



Akreditasi Perguruan Tinggi

No	Peringkat Akreditasi	Jumlah
1	Tidak terakreditasi	42
2	Terakreditasi A	0
3	Terakreditasi B	38
4	Terakreditasi C	0
5	Unggul	17
6	Baik Sekali	52
7	Baik	272
Total		421

Sumber : direktori.lldikti4.id

Pendahuluan



Peran Perguruan Tinggi

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan (UU 12/2022)



Menghasilkan SDM intelektual yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa



**Asta Cita
Presiden
dan Wakil
Presiden**



2

Ditjen Risbang

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

4

**Ditjen Dikti,
Ditjen Saintek**

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5

**Ditjen Risbang,
Ditjen Saintek**

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

TATA KELOLA KAMPUS AKUNTABEL

Perguruan Tinggi →
mewujudkan cita-cita
negara yaitu mencerdaskan
kehidupan Bangsa dan
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia
melalui tridharma
perguruan tinggi
(pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada
masyarakat)

Sistem tata kelola universitas
yang baik (Good University
Governance - GUG) untuk
menjamin kualitas, reputasi,
dan kepercayaan publik
terhadap Perguruan Tinggi
dalam mewujudkan peran PT
mencapai tujuan cita-cita
negara (Program Asta Cita)

Prinsip Good University Governance



Tata kelola akuntabel = Kunci PT berdaya & berdampak



Definisi Akuntabilitas

1. **Miriam Budiardjo:** akuntabilitas adalah **pertanggungjawaban** pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.
2. **Mardiasmo:** akuntabilitas adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan **pertanggungjawaban**, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
3. **Sedarmayanti:** akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban **mempertanggungjawabkan** keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas = Accountability ➡ **Pertanggungjawaban**

Akuntabilitas vs Responsibility



Akuntabilitas: pertanggungjawaban yang harus dicapai.
Responsibility: kewajiban untuk bertanggung jawab.

Mengapa Akuntabilitas Penting?



1. Mencegah Korupsi

Akuntabilitas berperan penting dalam mencegah **penyalahgunaan wewenang** dan praktik korupsi dalam institusi.



2. Meningkatkan Efisiensi

Dengan adanya akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas kinerja dapat ditingkatkan secara signifikan.



3. Kontrol Demokratis

Akuntabilitas menyediakan mekanisme kontrol demokratis yang penting bagi masyarakat.

Mewujudkan Tata Kelola yang Akuntabel



Perencanaan

- Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang selaras dengan Renstra Kementerian/LLDIKTI.
- Menggunakan data yang valid (data-driven) dan analisis risiko (risk-based planning) dalam menetapkan program dan prioritas.
- Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran mutu Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) secara terukur.
- Melibatkan Senat Akademik, SPI, dan LPM dalam proses perencanaan untuk menjamin objektivitas, integritas, dan kesesuaian standar mutu.



Pelaksanaan

- Mengelola anggaran, SDM, dan kegiatan tridharma secara efisien, sesuai dengan RKAT yang telah disahkan Yayasan.
- Menjalankan pengendalian internal (*internal control*) untuk mencegah penyimpangan, pemborosan, dan konflik kepentingan.
- Mengimplementasikan *digital governance* melalui integrasi sistem akademik, keuangan, dan kepegawaian agar data pelaksanaan mudah dipantau.
- Menegakkan nilai integritas dan etika akademik dalam setiap aktivitas pembelajaran, penelitian, dan layanan masyarakat.



Pertanggungjawaban

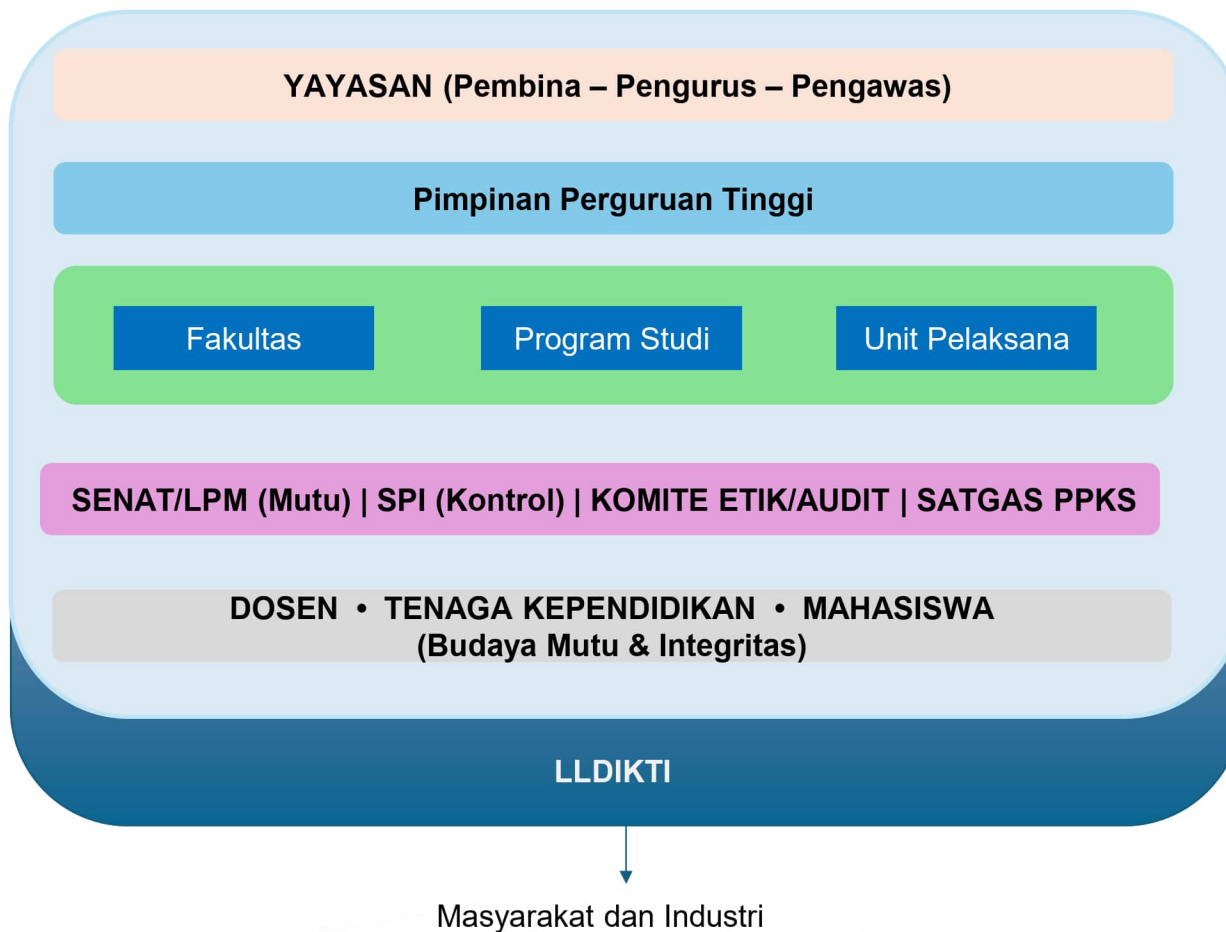
- Dilakukan melalui audit internal oleh Unit Audit (SPI) serta audit eksternal (auditor publik atau pemeriksa pemerintah).
- Pimpinan PTS menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan kepada Yayasan dan LLDIKTI.
- Melakukan evaluasi berbasis *outcome*, tidak hanya menghitung kegiatan, tetapi menilai dampak dan manfaatnya bagi mutu pendidikan dan kepercayaan publik. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan (*continuous improvement*) dalam siklus SPMI.



Pelaporan

- Kepatuhan pelaporan kepada otoritas terkait baik internal (Yayasan) maupun Eksternal (PDDIKTI, Sister, dll.)
- Publikasi hasil dan capaian untuk meningkatkan *public trust*.
- Menyertakan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bukti komitmen perbaikan berkelanjutan.

Memaksimalkan Seluruh Organ Perguruan Tinggi



Peran dalam Peningkatan Tata Kelola

pemegang tata nilai dan penjaga keseimbangan antara kepemilikan, pengawasan, dan profesionalitas manajemen kampus.

Aktor utama dalam membangun sistem pengendalian internal, budaya integritas, serta digital governance.

Menjamin mutu operasional, menjaga mutu akademik, efisiensi sumber daya, serta relevansi program dengan kebutuhan masyarakat.

Penjaga mutu berkelanjutan dan integritas akademik kampus. Mendorong akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Menjadi mekanisme kontrol moral dan profesional yang memperkuat kepercayaan publik. Menjamin tanggung jawab sosial dan perlindungan sivitas akademika.

Pelaku utama budaya mutu dan integritas: dosen menegakkan etika akademik; tendik memastikan layanan efisien; mahasiswa berpartisipasi dalam evaluasi mutu dan menjaga etika kampus.

LLDIKTI sebagai pembina eksternal melakukan pembinaan dan pengawasan mutu, sementara masyarakat dan industri menjadi penerima manfaat sekaligus penilai kepercayaan publik.

➔ *Menjadi cermin eksternal akuntabilitas dan mitra peningkatan kualitas pendidikan tinggi.*

Transformasi Pendidikan

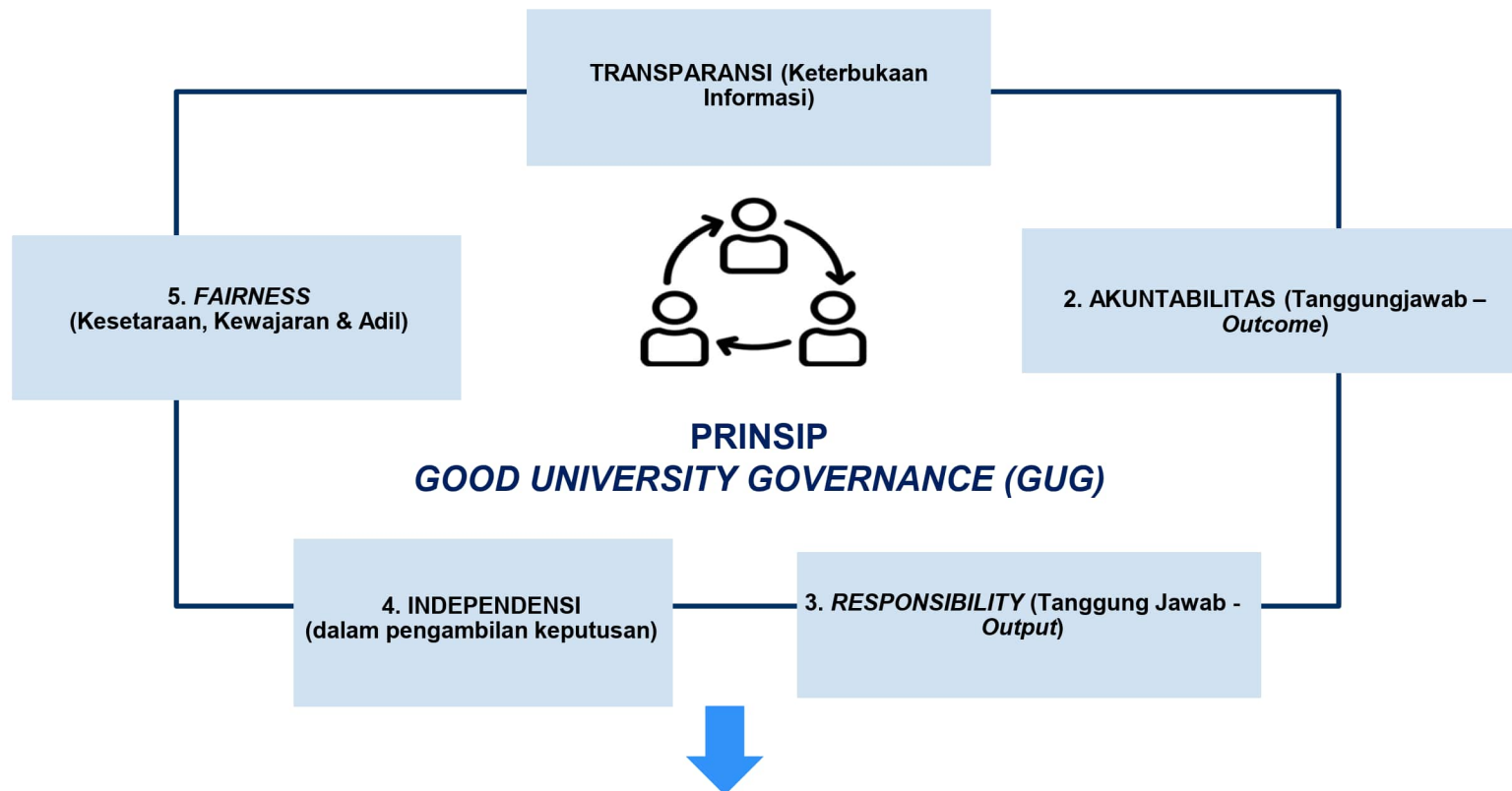


Reformasi Birokrasi Bidang Pendidikan



Good University Governance

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL



Terbentuknya struktur kerja dan menciptakan sistem *check and balances*

Tantangan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta

Dualisme Kepemilikan Yayasan – Perguruan Tinggi

- Terjadi tumpang tindih kepemilikan dan otoritas antara pihak yayasan dan pengelola kampus (rektorat).
- Dalam banyak kasus, yayasan dan perguruan tinggi dianggap satu entitas, padahal secara hukum keduanya berbeda.
- Muncul dua kubu kepemimpinan (“dualisme pengurus/pembina”) yang saling mengklaim legitimasi, terutama saat terjadi pergantian pengurus, pewarisan, atau perpecahan internal keluarga pendiri.
- Akibatnya, muncul dua versi keputusan, dua rekening, bahkan dua rektor, yang membingungkan mahasiswa, dosen, dan LLDIKTI.



Dampak pada tata kelola

- Prinsip independensi dan kontinuitas terganggu
- Akuntabilitas publik menurun
- Risiko hukum dan administratif tinggi
- Kinerja tridharma terhambat

Tantangan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta



Konflik Yayasan dan Manajemen Perguruan Tinggi

- Intervensi berlebihan Yayasan terhadap urusan akademik dan operasional kampus (misalnya rekrutmen dosen, pembukaan prodi, penggunaan dana)
- Tidak adanya pemisahan tegas antara fungsi kepemilikan (Yayasan) dan pengelolaan (Rektorat)
- Keputusan strategis sering tidak transparan dan tanpa justifikasi akademik.



Dampak pada tata kelola

- Prinsip independensi dan akuntabilitas terganggu
- Sistem pengendalian internal tidak efektif karena ada “*double command*.”
- Potensi konflik kepentingan meningkat, merusak kepercayaan masyarakat.

Tantangan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta

Perkuliahan Tidak Sesuai dan Ijazah Palsu

- PT yang menawarkan program studi atau kelas yang tidak sesuai kurikulum resmi, atau proses kuliah yang tidak memadai (jarak jauh tanpa pengawasan, pembelajaran minimal) sehingga lulusan seolah-oleh memenuhi syarat tetapi mutu akademiknya rendah.
- Terdapat praktik penerbitan ijazah tanpa proses pendidikan yang benar, atau “jual beli ijazah” oleh institusi yang melakukan sedikit atau tidak ada kuliah sama sekali.



Dampak pada tata kelola

- Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi. Jika lulusan diragukan kualitasnya, maka reputasi dan pencitraan kampus menurun.
- Melanggar prinsip integritas dan akuntabilitas dalam *good university governance*, institusi yang menerbitkan ijazah palsu atau tanpa proses sah menunjukkan kurangnya kontrol dan transparansi.
- Risiko sanksi regulasi, kampus dapat mendapatkan teguran, non-aktif, atau bahkan pencabutan izin karena pelanggaran akademik atau penerbitan ijazah tidak sah. Kumparan
- Outcome akademik (mutu lulusan, tracer study, daya saing) menurun, yang kemudian memengaruhi indikator kinerja institusi, akreditasi, dan daya tarik calon mahasiswa.

Tantangan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta



Integritas Akademik

- Plagiarisme, manipulasi data penelitian, dan publikasi di jurnal predator.
- Nilai, skripsi, atau kehadiran mahasiswa dimanipulasi (EKPT)
- “Dosen pinjaman” atau gelar palsu digunakan untuk memenuhi syarat akreditasi.



Dampak pada tata kelola

- Menurunkan kredibilitas institusi dan akreditasi
- Merusak prinsip integritas dan transparansi akademik dalam *Good University Governance*
- Meningkatkan risiko sanksi administratif dari Kementerian

Tantangan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta



Pengelolaan KIPK

- Beberapa PT terbukti melakukan pemotongan langsung dari dana tunjangan KIP-K (biaya hidup mahasiswa) atau menahan kartu ATM/rekening penerima sebelum pencairan. Modusnya juga termasuk: auto-debit oleh kampus setiap semester, atau mahasiswa “dipaksa” menyerahkan sebagian dana sebagai syarat pencairan. Akibatnya, mahasiswa penerima yang seharusnya mendapat bantuan penuh mengalami beban tambahan, keterlambatan pembiayaan studi, bahkan risiko berhenti studi.
- Penerima tidak tepat sasaran atau data mahasiswa dimanipulasi.
- Adanya penawaran KIP jalur aspirasi dengan berbagai syarat termasuk permintaan penyetoran dana pada oknum tertentu.



Dampak pada tata kelola

- Menurunnya kepercayaan publik terhadap kampus dan program bantuan pemerintah
- Potensi sanksi regulasi: kampus yang terbukti melakukan penyalahgunaan KIP-K bisa dilarang mengusulkan penerima baru atau bahkan izin programnya bisa terancam.

Tantangan Tata Kelola Perguruan Tinggi Swasta



Penanganan Kasus Kekerasan

- Beberapa kasus tidak segera ditangani oleh institusi, prosedur pelaporan dan penanganan korban lemah atau tidak ada (Belum ada Satgas PPKPT)
- Korban mendingkan diri karena takut atau tidak tahu ke mana harus melapor.
- Relasi kuasa di kampus (misalnya dosen-mahasiswa/ pimpinan universitas-staf universitas) sering membuka peluang penyalahgunaan sehingga korban terkadang tidak dilindungi dengan baik.



Dampak pada tata kelola

- Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi perguruan tinggi: kampus seharusnya menjadi lingkungan aman untuk belajar tetapi justru menjadi tempat kekerasan
- Ketika kampus gagal menangani kasus ini, maka berbagai unsur tata kelola lainnya (mutu akademik, integritas, pengelolaan SDM) ikut terdampak karena lingkungan tidak kondusif.
- Risiko reputasi dan legal

Temuan Fraud pada Perguruan Tinggi



Mewujudkan Kampus Akuntabel & Bermartabat



1. Budaya organisasi terbangun dari atas ke bawah (*tone at the top*) → Pimpinan Kampus adalah *role model* integritas.
2. Pengambilan keputusan harus bebas dari konflik kepentingan.
3. Mendorong *whistleblowing system* & perlindungan pelapor;
4. Konsisten dan konsekuen penegakan aturan : *punishment & rewards*.

KESIMPULAN



GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) - WORLD CLASS UNIVERSITY



Power Tends to Corrupt, and Absolute Power Corrupts Absolutely (Lord Acton)

Kanal Aduan dan Pelaporan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL



**POSKO PENGADUAN
ITJEN KEMDIKTISAINTEK**

Beranda Buat Pengaduan Cek Status Aduan Statistik Kriteria Kebijakan FAQ Kontak Kami

Selamat Datang di Posko Pengaduan Itjen Kemdiktisaintek

Posko Pengaduan adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

[Buat Pengaduan](#)



lapor.go.id



Pusat Panggilan 126

ult@kemdiktisaintek.go.id

aduanitjen.kemdiktisaintek.go.id





TERIMA KASIH

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi